

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan *principal* dengan *agent*. Teori keagenan ini membuat sebuah model mengenai suatu hubungan kontraktual antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). *Principal* mendelegasikan suatu tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*) sesuai dengan kontrak kerja. Tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab *agent* dan *principal* diatur dalam kontrak kerja yang disepakati bersama.

Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan profesional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer sebagai *agen* akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja *agen* untuk memastikan modal yang

dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanamkan berkembang dengan optimal.

Eisenhardt (dalam Arifin, 2005) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi yaitu: (1) asumsi tentang sifat manusia (*human assumptions*), (2) asumsi tentang keorganisasian (*organizational assumption*), dan (3) asumsi tentang informasi (*information assumption*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) *self-interest*, yaitu sifat manusia yang mengutamakan kepentingan sendiri, (2) *bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, (3) *risk aversion* yaitu sifat manusia yang cenderung memilih menghindari resiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (3) asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi adalah komoditas yang dapat dibeli. Pihak manajemen atau manajer, merupakan kunci dari segala sumber informasi yang beredar di lingkungan perusahaan. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan daripada *principal*. Dengan informasi yang dimilikinya tersebut, manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik. Para agen berkepentingan untuk mendapatkan imbalan yang sesuai untuk kinerjanya dalam mengoperasikan perusahaan.

Pihak *principal* sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada agen untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap *agent* oleh para *principal*, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja *agent* yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh *principal* tidak memuaskan, *principal* dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Dengan demikian di dalam suatu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik *principal* dan kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar pula, dengan kata lain kepentingan pribadi agen sendiri.

Posisi *agent* sebagai pemegang kunci informasi dan *principal* sebagai penerima informasi dari *agent* dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymetri*), yaitu suatu kondisi dimana informasi yang diperoleh oleh pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*Preparer*) dengan pihak *principal* secara umum tidak seimbang.

Menurut Jensen and Meckling (1976), terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu :

- a. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.
- b. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Asimetri antara manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk berlaku oportunistik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Misalnya dengan tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus pribadi. Manajer dapat melakukan manajemen laba untuk menyetatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Dengan semakin tingginya asimetri informasi antara manajer dengan pemilik mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan ada tiga jenis *agency cost*. *Principal* dapat membatasi penyimpangan (*divergencies*) kepentingan dengan menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dirancang untuk membatasi penyimpangan aktivitas yang

dilakukan agen. Dalam beberapa situasi tertentu prinsipal memberikan kesempatan kepada agen untuk membelanjakan sumber daya perubahan (biaya bonding/*bonding cost*) yang diharapkan dapat menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal. Nilai uang yang timbul dari hubungan keagenan. Biaya yang sejenis ini disebut dengan biaya kerugian residual (*residual cost*).

Teori keagenan lebih menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisien dalam hubungan principal dan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang berisi gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban *principal* dan *agent*, sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan dan meminimalisir biaya keagenan (*agency cost*).

Hubungan antara *principal* dan *agent* ini, merupakan hal mendasar bagi praktek penerapan *Corporate Governance* secara luas. Hal ini dapat kita lihat dalam teori-teori yang melandasi pengertian mengenai perusahaan sebagai tempat penerapan *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholder theory*) (Tjager, 2003). *Shareholding theory* menyatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Sementara itu, *Stakeholding theory* menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana para *stakeholder (principal)* mendapatkan jaminan dan keyakinan bahwa manajer perusahaan (*agent*) akan memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak menyalahgunakan wewenang atau menginvestasikan modal ke dalam proyek yang tidak menguntungkan. Dalam artian sempit, teori keagenan sebagai dasar penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan dan sebagai rujukan para investor mengontrol para manajer. Secara luas, *Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima tingkat pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan.

2. Good Corporate Governance

a. Pengertian Corporate Governance

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2004) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Organization for Economic Cooperation and Development (2004) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa esensi dari *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

b. Prinsip Corporate Governance

Corporate Governance memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan.

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

c. Manfaat dan Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Good Corporate governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan menghindari terjadinya krisis juga kegagalan yang serupa di masa mendatang.

Menurut FCGI, pelaksanaan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Manfaat *Good corporate Governance* dari sisi manajemen dapat dilihat bahwa suasana kerja menjadi lebih nyaman dan teratur, artinya segala proses kerja berjalan mulus, terkontrol, dan terciptanya kerja tim yang solid. Selain itu penjualan bisa di atas pasar, profit meningkat, berbagai penghargaan dapat diperoleh, dan meningkatnya kepercayaan mitra. Dengan *Good Corporate Governance*, integritas perusahaan lebih dipercaya pihak luar yang berkepentingan (*stakeholder*), memacu profesionalisme karyawan, kinerja keuangan yang cemerlang, serta stabilitas harga yang baik.

Sedangkan tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham.
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- 4) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

d. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam suatu organisasi. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut, “Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi” (Irmala Sari, 2010).

“Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan external *mechanism*” (Sri Hexana Lastanti, 2004). Internal mekanisme adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi,

komposisi dewan komisaris, komite audit dan pertemuan *board of director*. Sedangkan external mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dengan mekanisme pasar.

Sedangkan menurut Joni Emirzon (2007) menyatakan bahwa: “Agar tata kelola perusahaan dapat dilakukan dengan baik atau memenuhi prinsip GCG, maka unsur-unsur dan perangkat GCG terdiri atas sebagai berikut :

1) Pemegang Saham

Pemegang saham yaitu seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.

2) Komisaris

Komisaris yaitu sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

3) Direksi

Direksi yaitu seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan Politeknik.

4) Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Yang berwenang membentuk komite adalah Dewan Komisaris.

5) Sekretaris Perusahaan

Sekretaris yaitu seseorang yang membantu seorang pemimpin atau badan pimpinan ataupun suatu perusahaan, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional perusahaan.

6) Manajer

Manajer adalah seorang anggota organisasi yang bertugas mengarahkan, mamadukan, mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang lain.

7) Karyawan

Karyawan merupakan seseorang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga

kerja, yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya.

8) Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Auditor Internal merupakan karyawan perusahaan yang mengaudit berbagai segmen dari organisasi untuk memastikan bahwa para karyawan mematuhi kebijakan-kebijakan perusahaan dan operasi perusahaan berjalan secara efisien. Sedangkan Auditor Eksternal adalah Audit terpisah dari perusahaan yang disewa oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disusun telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Kinerja Keuangan Perusahaan

a. Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan

Wibowo (2004:23) menjelaskan bahwa kinerja berasal dari pengertian *Performance*. Adapun pengertian *performance* sebagai hasil kerja baik yang berupa potensi kerja atau bahkan kegiatan yang membawa dampak buruk bagi perusahaan. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, tidak hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja keuangan secara umum dan keunggulan kompetitif merupakan suatu ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil. Pengukuran terhadap pengembalian investasi, pertumbuhan, volume, laba dan tenaga kerja pada perusahaan umum dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan.

Pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Penilaian kinerja keuangan perusahaan harus diketahui output dan inputnya (Munawir, 2010:31). Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari perusahaan dan akan dapat diketahui hasil-hasil yang dicapai dari waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. Perkembangan dalam pengukuran kinerja keuangan semakin beragam dan mempunyai keunggulan serta kelemahannya masing-masing (Dewayanto, 2010:14).

b. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui penilaian kinerja, manajer dapat menggunakannya dalam mengambil keputusan penting dalam rangka bisnis perusahaan, seperti menentukan tingkat gaji karyawan, dan sebagainya, serta langkah yang akan diambil untuk masa depan. Sedangkan bagi pihak luar, penilaian kinerja sebagai alat pendeteksi awal dalam memilih alternatif investasi yang digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.

c. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi.

Adapun manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen perusahaan adalah sebagai berikut: (Mulyadi, 2009)

- 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
- 6) Penghargaan digolongkan dalam dua (2) kelompok, yaitu:
 - a) Penghargaan intrinsik, berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah

mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan berbagai teknik seperti pengayaan pekerjaan, penambahan tanggungjawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan.

- b) Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan, baik yang berupa kompensasi langsung (gaji, honorarium lembur dan hari lembur, pembagian laba, pembagian saham, dan bonus), kompensasi tidak langsung (asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan, dan tunjangan masa sakit), dan kompensasi non keuangan (ruang kerja yang memiliki lokasi istimewa, dan tempat parkir luas), dimana ketiganya memerlukan data kinerja karyawan agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh karyawan yang menerima penghargaan tersebut.

d. Rasio yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam penelitian Anggia Zainur Rahmah (2016) memaparkan bahwa rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Maka masing-masing rasio yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, antara lain :

1) Current Ratio

Current Ratio sering digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Prastowo (2011) menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati untuk mengambil kesimpulan mengenai likuiditas suatu perusahaan. Likuiditas suatu perusahaan yang tinggi belum tentu baik ditinjau dari segi profitabilitas perusahaan tersebut.

Brigham dan Houston (2006) menjelaskan perhitungan current ratio dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Aset Lancar}}{\textit{Hutang Lancar}}$$

2) Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang (*leverage*) terhadap modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Brigham dan Houston (2006), menjelaskan rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Total Hutang}}{\textit{Modal Sedniri}} \times 100\%$$

3) Total Assets Turn Over

Rasio ini mengukur perputaran seluruh aset perusahaan, Prastowo (2011) menjelaskan rasio perputaran total aset mengukur

aktivitas aktiva dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan aktiva tersebut. Rasio ini juga mengukur seberapa efisien aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Brigham dan Houston (2006) menjelaskan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

4. Ukuran Perusahaan

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dilakukan untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan *financial* dari perusahaan dan akan dapat diketahui hasil-hasil yang dicapai dari waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. Perkembangan dalam pengukuran kinerja keuangan semakin beragam dan mempunyai keunggulan serta kelemahan masing-masing (Dewayanto 2010:14). Pengukuran kinerja keuangan dalam hal ini menggunakan satu rasio yaitu Rasio Profitabilitas. Rasio Profitabilitas menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sebagai pengukur apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang pantas atas investasinya. Ukuran kinerja perusahaan yang biasa digunakan adalah : (Kamaludin, 2011:45)

a) *Profit Margin Ratio*

Profit Margin Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya.

i. *Net Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

Net Profit Margin Ratio menurut Riyanto (1999:37) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Net Operating Income}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Net Sales} - (\text{HPP} + \text{By. penjualan} + \text{By. administrasi})}{\text{Net Sales}} \times 100$$

ii. *Operating Profit Margin*

Raiso ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia,

serta pemasaran dalam menghasilkan laba. Menurut (Munawir, 2001 : 100) operating margin dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{HPP + \text{By. Penjualan} + \text{By. Administrasi}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%$$

iii. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi. Gross profit margin ratio menurut (Munawir, 2001:99) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

b) *Return on Equity*

Return on Equity menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak

manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisiensi penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Rumus ROE dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

c) *Return on Assets*

Return on Assets menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar.

Rumus ROA dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Judul	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada RSUD Muhammadiyah Yogyakarta
	Peneliti	Endar Wahyu Prasetyani (2009)
	Variabel	Independen : <i>Good Corporate Governance</i> Dependen : <i>Net Profit Margin (NPM)</i> , <i>Return on Equity (ROE)</i> , <i>Return on Investment (ROI)</i>
	Hasil	Penerapan GCG oleh rumah sakit berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM, penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROI.
2	Judul	Pengaruh <i>Corporate Governance Perception Index</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan <i>Go Public</i> di BEJ
	Peneliti	Stephanus Banu Wijaya (2009)
	Variabel	Independen : <i>Corporate Governance</i> Dependen : Kinerja Perusahaan
	Hasil	<i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Tobin's Q</i> , <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROE, <i>corporate governance</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap NPM.
3	Judul	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI
	Peneliti	Novita Handayani (2015)
	Variabel	Independen : Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Dependen : Kinerja Perusahaan
	Hasil	Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja

		<p>perusahaan. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan regresi linier berganda secara serentak kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.</p>
4	Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar pada IICG 2012-2015)
	Peneliti	Septian Marwanto (2017)
	Variabel	<p>Independen : Hasil akhir skor atau angka indeks penerapan GCG yang diperoleh dari hasil riset. Dependen : Kinerja Perusahaan</p>
	Hasil	<p>Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q Terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA Terdapat pengaruh signifikan antara GCG terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ATO.</p>
5	Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (studi kasus perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI tahun (2011-2013)
	Peneliti	Achmad Yasin Bambang Irawan (2015)
	Variabel	<p>Independen : Dewan Komisaris independen, Dewan Direksi, <i>Leverage</i>, dan Ukuran Perusahaan. Dependen : Kinerja Keuangan</p>
	Hasil	Variabel dewan komisaris independen, dewan direksi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Variabel <i>leverage</i> berpengaruh positif

		terhadap kinerja perusahaan Variabel dewan komisaris, dewan direksi, leverage dan ukuran perusahaan secara bersamaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
6	Judul	<i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan
	Peneliti	Herman Darwis
	Variabel	Independen : Implementasi <i>Corporate Governance</i> , Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komisaris Independen. Dependen : Kinerja Perusahaan Variabel Kontrol : Kesempatan Pertumbuhan/Investasi (<i>Growth/Investment Opportunities</i>) dan Ukuran Perusahaan (<i>SIZE</i>)
	Hasil	Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi GCG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti perusahaan yang terdaftar di BEI dan mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG apabila menerapkan <i>good corporate governance</i> dengan baik, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Semakin tinggi penerapan <i>corporate governance</i> yang diukur dengan <i>corporate index perception</i> semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.
7	Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur <i>Go Public</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di BEI 2011-2013)
	Peneliti	Andri Veno
	Variabel	Independen : Dewan Direksi, Komisaris Independen, Total Dewan Komisaris dan Komite Audit Dependen : <i>Good Corporate Governance</i>
	Hasil	1. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan 2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 3. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan

		<p>4. Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan</p> <p>5. Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris, dan Komite Audit secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.</p>
8	Judul	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan
	Penulis	MI Mitha Dwi Restuti
	Variabel	<p>Independen : <i>Corporate Governance</i></p> <p>Dependen : Kinerja Perusahaan</p> <p>Variabel Kontrol : komposisi aktiva perusahaan, kesempatan pertumbuhan</p>
	Hasil	Dari hasil pengujian dan analisis dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan.
9	Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (studi empiris pada Perusahaan Jasa Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011)
	Peneliti	Prasty Puji Lestari
	Variabel	<p>Independen : Proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, independen komite audit, dan <i>Audit quality</i></p> <p>Dependen : kinerja perusahaan</p>
	Hasil	Penelitian ini membuktikan <i>good corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel kepemilikan institusional, independensi komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham institusional, independensi komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Variabel proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (<i>Tobin's Q</i>).
10	Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan High Profile yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013

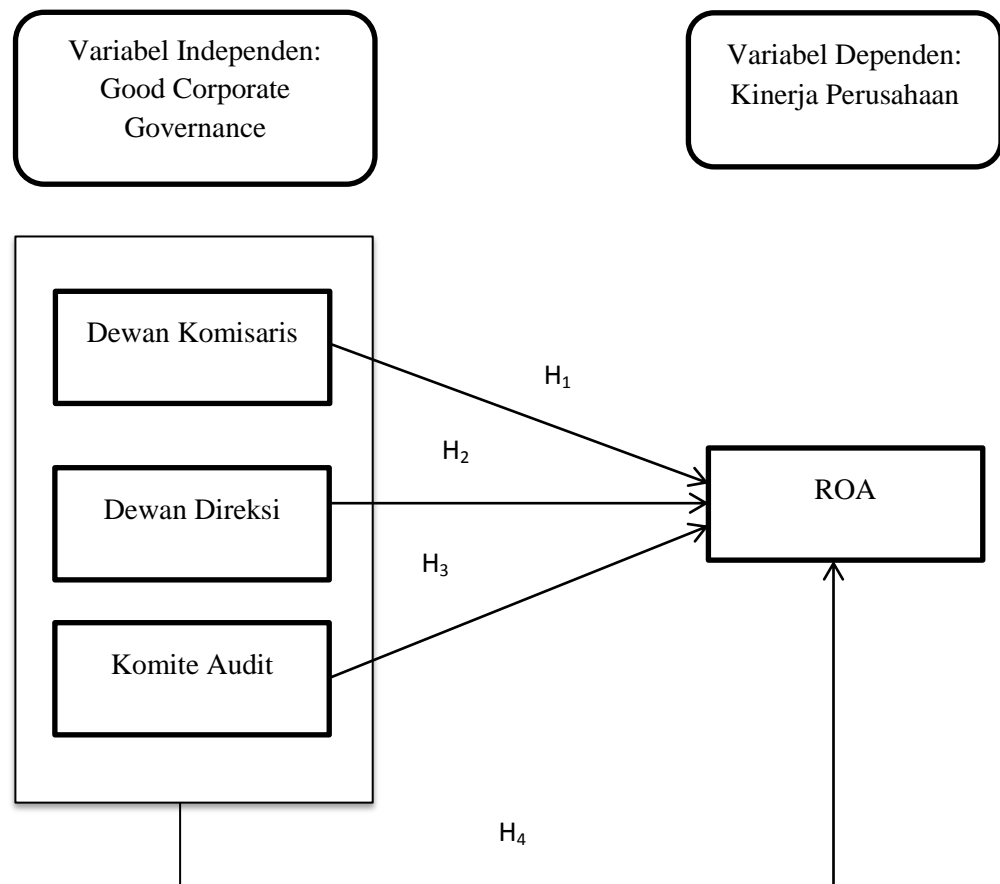
	Peneliti	Cintia Yuniarti
	Variabel	<p>Independen : Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Publik, dan Kepemilikan Asing</p> <p>Dependen : Kinerja dan Nilai Perusahaan</p>
	Hasil	<p>1) Proporsi Dewan Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 1,324 dan Nilai Perusahaan 1,122.</p> <p>2) Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 2,317 dan Nilai perusahaan 5,054.</p> <p>3) Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar -1,268 dan Nilai Perusahaan 1,539.</p> <p>4) kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 2,719 dan Nilai Perusahaan 2,646</p> <p>5) Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 2,734 dan nilai perusahaan 2,544.</p> <p>6) Kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 0,648 dan Nilai Perusahaan 0,440</p> <p>7) Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 3,414 dan Nilai perusahaan 2,020</p> <p>8) kepemilikan Asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan t hitung sebesar 2,679 dan nilai perusahaan 2,594.</p>

Sumber : Data diolah, 2018

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampai melalui data yang terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Hubungan Dewan Komisaris dengan Kinerja Perusahaan

Menurut Chtourou *et al* (2001) bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jensen & Eisenburg *et al* (dalam Faisal 2005) menyatakan jumlah dewan komisaris yang kecil akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian Marn dan Romuald (2012) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitiannya tersebut, disebutkan argumen dari Yermack (1996), Sundgren dan Wells (1998), dan Jensen (1993), yang menyatakan bahwa semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris.

Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

2. Hubungan Dewan Direksi dengan Kinerja Perusahaan

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (bordroastuti, 2009). Dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan direksi. Peningkatan dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pearce dan Zahra, 1992). Teori ini didukung oleh hasil penelitian Hapsoro (2008) serta Maryamah dan Amilin (2011) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hardikasari (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan

dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil. Penelitian tersebut antara lain penelitian dari Jensen (1993), Lipton dan L'orsch (1992) dan Yermack (1996). Namun demikian, Dalton *et al.* (dalam Hardikasari, 2011) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan.

Dari uraian diatas, jelas bahwa ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam penelitian sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam melihat peran ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

3. Hubungan Komite Audit dengan Kinerja Perusahaan

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Puradiredja (2006:4) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan

keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan.

Penelitian Venny Maulidah Perdani (2016) menyatakan bahwa Komite Audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

4. Hubungan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit dengan Kinerja Perusahaan

Sulistyowati (2017) menyatakan bahwa Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan menunjukkan bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Demikian juga dengan penelitian Venny Maulidah Perdani (2016) menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja

keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode pengamatan tahun 2010-2014.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H4 : Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit secara bersama-sama atau Simultan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan